

PERTANIAN PADI PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA GUBERNUR SOELARSO TAHUN 1988-1993**NUNIK DAMAYANTI**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: nunikd30@gmail.com

Agus Suprijono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang potensial dengan menyumbang 40% hasil pertanian. Jawa Timur sebagai salah satu kontributor terbesar di Indonesia dalam swasembada beras. Pada perkembangannya sistem pertanian di Jawa Timur menurun yang ditandai dengan pertumbuhan per tahun di bawah 3,4%. Baru setelah tahun 1990 Jawa Timur menunjukkan kestabilannya yang ditandai dengan prestasi yang di dapat yaitu di bidang intensifikasi pertanian. Pada Pelita V Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soelarso. Soelarso dirasa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya dibidang ekonomi pertanian dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diperoleh yaitu Rotary Pin dan Bintang Mahaputra Utama. Masalah Dalam Penelitian yaitu: (1) Apa yang melatar belakangi munculnya ekonomi pertanian Soelarso, (2) Bagaimana kebijakan ekonomi pertanian masa Soelarso diimplementasikan?, (3) Bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi pertanian Gubernur Soelarso bagi masyarakat Jawa Timur?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan pertanian padi di Jawa Timur sebelum pemerintahan Gubernur Soelarso, Untuk menganalisa pertanian padi pada masa Soelarso, Untuk menganalisa pengaruh perkembangan pertanian padi pada masyarakat Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pertama turunnya produksi padi pada akhir Pelita IV disebabkan karena kurangnya penanganan pascapanen serta peran KUD yang kurang begitu maksimal. Kedua kebijakan ekonomi pertanian Soelarso khususnya komoditi padi muncul pada satu tahun awal kepemimpinannya. Penekanan intensifikasi padi dengan pola Supra Insus dan Insus Paket D yang terdiri dari 10 unsur teknologi dilakukan melihat pertumbuhan ekonomi Jawa yang semakin memburuk di akhir Pelita IV. Dampak yang diperoleh adalah berkembangnya jumlah wadah partisipasi, Jawa Timur memperoleh berbagai prestasi Nasional dalam lomba insus pola tanam maupun lomba supra insus dan perkembangan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja petani.

Kata Kunci: *Intensifikasi Pertanian Padi, Gubernur Soelarso, Jawa Timur*

Abstract

East Java is one of the provinces with the potential for 40% of agricultural produce. East Java as one of the biggest contributors in Indonesia in rice self-sufficiency. In the development of farming systems in East Java decline marked by growth per year below 3.4%. Only after the 1990 East Java showed stability marked by achievements in the can that is in the field of agricultural intensification. At Pelita V East Java under the leadership Soelarso. Soelarso considered very influential on economic growth in East Java, especially in the field of agricultural economy is evidenced by the achievements obtained by the Rotary Pin and Star Top Mahaputra. Problems in Research: (1) What is the background for the emergence of Soelarso agricultural economy, (2) how the economic policies implemented Soelarso agricultural future?, (3) How to influence economic policy agricultural Soelarso governor for the people of East Java ?. The purpose of this study was to describe the rice farms in East Java before Governor Soelarso, to analyze rice farming during Soelarso, To analyze the effect of the development of rice agriculture in East Java community. This study uses historical research that includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study can be concluded as follows, the first decline in rice production by the end of the Fourth Development Plan due to lack of post-harvest handling and the role of cooperatives is less the maximum. Both agricultural economic policy Soelarso especially rice commodity appears in the early years of his leadership. Emphasis rice intensification with Supra pattern Insus and Insus Package D consists of 10 elements of the technology do see economic growth of

Java which worsened at the end of the Fourth Development Plan. Impact obtained is the growing number of containers of participation, East Java obtained various national achievements in the race and the race Insus cropping patterns supra Insus and development of employment and employment opportunities of farmers.

Keywords: *Rice Intensification of Agriculture, Governor Soelarso, East Java*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia menyadari bahwa kekayaan alam yang dimiliki mengharuskannya mencanangkan suatu program pembangunan khususnya pertanian yang sangat mendukung potensi yang dimiliki. Pada masa orde baru, yang mana pada awal tahun 1970-an Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan di segala bidang dari masa sebelumnya dengan suatu program pembangunan. Program tersebut dikenal dengan nama Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang terbagi dalam 6 tahap dan berlangsung selama 30 tahun. Setiap Pelita tersebut menitikberatkan pada masing-masing bidang, baik itu pertanian, industri, swasembada pangan, ekonomi, maupun pemerataan kesempatan kerja. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pasca orde lama.

Jawa menyumbangkan lebih dari rata-rata kontribusi pangan Nasional melebihi wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Jawa mempunyai peran utama dalam perubahan status Indonesia dari pengimport beras terbesar menjadi negara pengekspor terbesar di tahun 1984. Yang ditandai dengan keberhasilan swasembada beras sehingga mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Salah satu provinsi yang berperan penting pada proses swasembada beras adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah wilayah yang potensial dengan menyumbang 40% hasil pertanian seluruh Indonesia. Jawa Timur menjadi suatu provinsi yang berada di garis depan program intensifikasi padi yang telah mengubah ekonomi Indonesia sejak tahun 1967.¹ Jawa Timur memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama orde baru menunjukkan hasil yang terus

meningkat. Hal tersebut ditunjukkan Jawa Timur pada awal tahun 1980-an, yang mana Jawa Timur menduduki posisi kedua setelah Jawa Barat dalam perannya menghasilkan produksi beras di Indonesia.

Pertumbuhan rata-rata ekonomi masyarakat Jawa Timur pada pelaksanaan Pelita IV mencapai lebih dari 5% per tahunnya.² Pada 1986, sektor pertanian mulai mengalami konstruksi tingkat pertumbuhan di bawah 3,4 persen per tahun, amat kontras dengan periode sebelumnya. Penurunan pertumbuhan rata-rata provinsi Jawa Timur pada akhir Pelita IV diantaranya disebabkan oleh sistem pertanian khususnya intensifikasi pertanian yang gagal. Berbagai masalah muncul seperti serangan hama yang semakin besar diikuti dengan penyediaan pestisida yang kurang. Pada periode 1986-1997 ini sering dinamakan fase dekonstruksi karena sektor pertanian mengalami fase pengacuhan oleh para perumus kebijakan dan bahkan para ekonom sendiri.³ Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari 62,04 persen tanaman pangan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 1984 menjadi 60,67 persen di tahun 1988.⁴

Pada Pelita V Jawa Timur menunjukkan angka yang baik di tahun pertama berjalannya implementasi kebijakan intensifikasi pertanian. Ditandai dengan suatu prestasi yang di dapat dari presiden Soeharto dalam hal Intensifikasi Pertanian di tahun 1990. Hal tersebut juga berlangsung di tahun selanjutnya, yang mana keadaan ekonomi regional Jawa Timur tahun 1992 menunjukkan angka yang cukup berarti. Ekspor Jawa Timur keluar negeri mencapai 32,23 % sedangkan ekspor keluar Provinsi naik sebesar 7,45 %. Secara keseluruhan ekspor Jawa Timur naik sebesar 11,57%. Menurut perhitungan atas dasar harga konstan 1983 pendapatan per kapita periode tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 mengalami peningkatan 6,42 % rata-rata per tahun terhadap tahun 1988.⁵ Pertumbuhan pendapatan perkapita

² Hikmah Rafika Mukti, *Kebijakan Pangan*, Universitas Indonesia, 2009

³ Bustanul arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2004, hlm 5

⁴ Soekarwati, *Pembangunan Pertanian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994. Hlm 05

⁵ *Ibid* hal 34

¹ Fox, James J dan Howard Dick, , *"Pembangunan yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru"*, PT, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 46

atas dasar harga konstan 1983 yang terendah terjadi pada tahun 1987 sebesar 3.56%. Hal ini menunjukkan adanya suatu keberhasilan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata per tahunnya antara Pelita IV dan Pelita V menunjukkan angka perbedaan yang cukup besar. Pertumbuhan rata-rata selama Pelita IV mencapai 5.86% dan Indonesia mampu berswasembada beras pada waktu itu, jelas hal tersebut merupakan prestasi yang sangat baik. Akan tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi rata-rata selama Pelita IV ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hasil pertumbuhan rata-rata selama Pelita V yaitu sebesar 7.03% per tahunnya. Beberapa keberhasilan Provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan akhir periode pembangunan jangka panjang I di berbagai bidang pada masa orde baru menunjukkan eksistensi tersendiri dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Walaupun provinsi lain juga ikut serta dalam pembangunan nasional pada waktu itu. Soeharto menjadi tonggak dari keberhasilan orde baru atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, yang kemudian diserahkan kepada Gubernur di masing-masing daerah Provinsi yang kemudian semua kebijakan sistem pertanian Jawa Timur mengacu pada kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Khususnya Jawa Timur yang mulai dipimpin oleh Gubernur R.M.T. Ario Soerjo sampai dengan Soekarwo yang masih menjabat sampai tahun 2016 pastinya memberikan suatu kebijakan, implementasi, serta dampak tersendiri di masing-masing dari kepemimpinan mereka. Jawa Timur mempunyai sebutan sebagai daerah lumbung padi dengan keberhasilannya di awal tahun 1980-an serta memperoleh suatu penghargaan dalam bidang intensifikasi pertanian di tahun 1990.⁶ Pada tahun 1990-an Jawa Timur berada di bawah kepemimpinan seorang yang mempunyai latar belakang Militer yaitu Soelarso yang kemudian membawa dampak yang cukup baik dan efektif dalam pelaksanaannya terhadap Jawa Timur setelah tahun kritis di akhir Pelita IV khususnya di bidang pertanian. Kemudian kembali membaik awal tahun 1990 dan mencapai hampir 25 persen dari PDB Jawa Timur pada tahun 1995.

Berbagai keberhasilan yang diperoleh Jawa Timur pada Pelita V menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang berlaku berjalan sangat baik. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain karena upaya-upaya penekanan oleh Gubernur Soelarso terhadap petani Jawa Timur. Soelarso dirasa membawa pengaruh yang sangat

besar bagi Jawa Timur khususnya di bidang pertanian. Asumsi tersebut ditandai dengan berbagai prestasi yang diperoleh Soelarso selama masa jabatannya. Diantaranya adalah Rotary Pin yang diterima oleh Soelarso dari Rotary Club Surabaya Metropolitan (RCSM) sebagai anggota kehormatan. Rotary Pin adalah suatu prestasi yang hanya diberikan kepada para tokoh yang dinilai telah berjasa, baik dalam pembangunan maupun menjalin persahabatan antar bangsa. Kemudian di tahun 1991 Soelarso mendapatkan Bintang Mahaputra Utama. Bintang tersebut dianugerahkan kepada Soelarso oleh presiden Soeharto karena dinilai berjasa luar biasa dalam pembangunan di provinsi Jawa Timur. Untuk itu keberhasilan Jawa Timur dalam menghidupkan kembali ekonominya dirasa sukses di bawah kepemimpinan Soelarso.

Dalam penelitian ini, diambil permasalahan mengenai pelaksanaan pertanian padi di Jawa Timur melihat dari beberapa periode meningkatnya ekonomi daerah Jawa Timur disebabkan oleh berhasilnya sistem pertanian khususnya komoditi padi. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda di akhir Pelita IV dan kembali stabil kembali pada dua tahun awal Pelita V. Perbedaan kebijakan menjadi salah satu alasan keberhasilan sistem pertanian yang wajib diteliti.

Berdasar hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertanian padi di Jawa Timur sebelum pemerintahan Gubernur Soelarso?. (2) Bagaimana pertanian padi pada masa Soelarso?. (3) Bagaimana pengaruh perkembangan pertanian padi pada masyarakat Jawa Timur?.

METODE

Penelitian mengenai Pertanian Padi Provinsi Jawa Timur Pada Masa Gubernur Soelarso Tahun 1988-1993 menggunakan metode pendekatan sejarah (*historical approach*), yang mempunyai empat tahapan proses penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik merupakan tahapan pertama sebagai tahapan proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah⁷. Dari penelusuran sumber yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa sumber tentang pertanian padi provinsi Jawa Timur pada pelita V baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa Koran Surabaya Post, Kompas, dan Jawa Post tahun 1984 sampai tahun 1993. Arsip Hasil Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pelita V Tahun 1993, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Sumber sekunder merupakan data yang ditulis oleh orang

⁶ Atep, Afia, *Beberapa Catatan Mengenai Swasembada Pangan*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 1994, hlm. 02

⁷ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10-11.

lain serta buku-buku referensi yang diperoleh di perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya maupun Perpustakaan Daerah Kota Surabaya.

Langkah kedua adalah kritik. Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik, selanjutnya harus melalui tahapan kritik. Terdapat dua macam kritik, yakni kritik ekstern untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber, dari tahapan ini ditemukan kondisi dari Koran Surabaya Post edisi tahun 1984-1987 banyak yang rusak. Kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber yang bisa dipercaya.⁸ Dari sumber-sumber yang terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan pengujian melalui kritik. Langkah peneliti untuk melakukan pengujian keaslian dan keakuratan dari data yang didapatkan dengan membandingkan antara data satu dengan data lainnya dengan maksud menegakkan "fakta aktual" yang menjadi dasar untuk konstruksi sejarah.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan/kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna saling berhubungan dari pada fakta-fakta yang diperoleh.⁹ Dalam tahap Interpretasi ini peneliti mengkaitkan fakta yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya, yakni dengan menghubungkan fakta yang berasal dari tabloid posmo dengan sumber lainnya seperti wawancara.

Tahap terakhir dari penelitian adalah historiografi dengan bentuk narasi yang disusun dalam tulisan sejarah.¹⁰ Pada tahap historiografi ini peneliti memaparkan hasil penafsiran sumber ke dalam bentuk tulisan sejarah. Usaha/tahap ini dilakukan agar obyek yang dijadikan bahan kajian menjadi lebih hidup, sehingga fakta tidak menjadi ingatan belaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanian Padi Provinsi Jawa Timur Pada Masa Gubernur Wahono

Pertanian padi merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan di Indonesia sekaligus langkah yang mampu menekan laju inflasi pada awal orde baru. Pelaksanaan sistem pertanian padi mengalami perkembangan yang cukup baik di awal pelaksanaan Pelita. Pelita adalah suatu rencana pembangunan lima tahun pemerintah orde baru guna meningkatkan ketahanan pangan serta ekonomi Indonesia. Jawa Timur memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi selama

orde baru. Indonesia pernah mengalami masa kejayaan dengan mampu berswasembada beras di tahun 1984. Jawa Timur sebagai kontributor terbesar pada waktu itu menyusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif dan implementasi dari petani yang dilakukan dengan sangat baik.

Pada perkembangannya ekonomi Jawa Timur menurun yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada Pelita IV sebesar 3,4%. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya karena penurunan produksi padi pada tiga tahun terakhir setelah swasembada beras. Pelaksanaan pertanian pada Pelita IV di Jawa Timur pada awalnya menggunakan pola insus. Pada tiga tahun pelaksanaan insus di Jawa Timur sejak tahun 1984 mengalami berbagai kendala yang meliputi; mekanisme pascapanen yang kurang dipahami oleh petani, serangan hama, dan harga dasar padi yang fluktuatif sehingga menyusahkan petani. Pelaksanaan Pelita IV di Jawa Timur dibidang pertanian pada tahun pertama menggunakan pola supra insus yang terdiri dari penggunaan tanah secara optimal, yaitu pengelompokkan tanah berdasarkan kondisi fisiknya yang kemudian disesuaikan dengan tanaman yang cocok bagi daerah masing-masing. Pada waktu itu pengelompokkan wilayah dibagi menjadi tiga bagian yaitu Jawa Timur bagian utara yang merupakan jenis tanah berkapur, Jawa Timur bagian tengah yang merupakan kawasan subur, dan Jawa Timur bagian selatan bagian dari pegunungan kapur selatan yang bermula dari Gunung Kidul Yogyakarta.

Indikator kedua dalam pola insus adalah penggunaan benih bermutu dan pupuk berimbang. Pada pelaksanaan Pelita IV di Jawa Timur menggunakan benih IR36 karena terbukti masa tanamnya lebih pendek dibandingkan dengan varietas unggul lainnya. Kemudian penggunaan pupuk mencapai 412.000 ton yang meliputi pupuk urea 242.000 ton, pupuk TSP 77.000 dan ACL 8 rb ton.¹¹ Naiknya penggunaan pupuk disebabkan karena konservasi lahan yang semakin meningkat. Selanjutnya kebutuhan air selama masa tanam memaksimalkan aliran sungai dan waduk. Pemaksimalan waduk pada musim penghujan adalah untuk persediaan dimusim kemarau. Adanya lembaga Kredit Unit Desa (KUD) di setiap desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani. KUD dituntut untuk membeli padi petani langsung di sawah agar tidak terlalu membebani petani khususnya dibidang transport.

Beberapa langkah yang dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 3.1 Perkembangan Tanaman Pangan Padi Tahun 1984-1987

¹¹ Surabaya Post, senin 23 januari 1986. *Swasembada Pangan 1986, Tidak Ada Masalah Yang Prinsip di Jatim*

⁸ Suhartono Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 37.

⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm 15.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Ibid.*, hlm 19

No	PADI	1984	1985	1986	1987	Keterangan
1	Perkembangan Produksi	7.59 3.60 7	7.59 5.37 4	7.69 5.18 5	7.58 7.55 0	(Ton)
2	Perkembangan Luas Panen	1.56 4.34 2	1.57 1.23 7	1.59 3.43 0	1.53 7.64 1	Luas Panen (Ha)
3	Perkembangan hasil rata-rata per hektar	48.5 4	48.3 4	48.2 9	49.3 6	Hasil rata-rata (Kw/Ha)

Sumber: Rancangan Program Tahunan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Tahun 1990/1991

Hasil tabel di atas menunjukkan tingkat perkembangan tanaman padi mulai dari perkembangan produksi, perkembangan luas panen, dan perkembangan hasil rata-rata per hektar. Jika dilihat secara keseluruhan, maka terjadi penurunan tanaman pangan padi yaitu dilihat dari perkembangan produksi padi, maka terjadi penurunan dari tahun ke tahun yang mana di tahun 1987 hanya mencapai 7.587.550 ton. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 1986 yang mencapai 7.695.185 ton. Walaupun pada dasarnya jumlah tersebut hanya terpaut 6.057 ton dengan hasil produksi tahun 1984 yang pada waktu itu dikenal Indonesia berhasil berswasembada beras yang kontribusinya berasal dari wilayah Jawa khususnya Jawa Timur. Akan tetapi jumlah tersebut menunjukkan bahwa produksi padi di akhir pelaksanaan Pelita IV menunjukkan hasil penurunan.

Selanjutnya mengenai luas panen, yang mana perkembangan luas panen padi di Jawa Timur dari tahun 1984 sampai 1987 hasil yang ditunjukkan tidak jauh berbeda dengan hasil dari perkembangan produksi. Karena hasil produksi yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh perkembangan luas panen. Luas panen di Jawa Timur dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1986 mengalami kenaikan yaitu mulai dari 1.564.342 Ha di tahun 1984, 1.571.237 Ha di tahun 1985, dan 1.593.430 Ha di tahun 1986. Sedangkan hasil tersebut tidak terlihat di tahun 1987, yang mana luas panen turun 55.789 Ha dari hasil luas panen di tahun 1986. Kemudian jika dilihat dari hasil rata-rata per hektar mengalami kenaikan dari 48.54 Kw/Ha di tahun 1984 menjadi 49.36 Kw/Ha di tahun 1987. Hal tersebut memungkinkan beberapa faktor penyebab penurunan itu terjadi yang tidak lain karena faktor iklim (hujan) yang tidak menentu dan kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani penurunan hasil panen tanaman pangan khususnya padi.

Penurunan jumlah produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah;

a) Semakin Mengecilnya Areal Padi Sawah

Berkurangnya lahan sawah menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah produksi padi bagi petani. Setelah Indonesia mampu berswasembada beras, perhatian pemerintah mengenai pembangunan di Indonesia lebih dipusatkan kepada industri. Sehingga lahan sawah yang aktif dialihfungsikan kepada lahan industri dengan dimulainya pembangunan gedung pabrik dan perkantoran.

b) Penanganan Pascapanen

Penanganan pascapanen di Indonesia khususnya Jawa Timur merupakan masalah utama yang harus diselesaikan. Tidak hanya pada mekanisme pascapanennya tetapi juga pada petani itu sendiri. Pada tahun 1985 jumlah produksi padi melampaui target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hasil tersebut tidak berjalan seimbang dengan pengetahuan petani akan pentingnya penanganan pascapanen. Mekanisme yang seharusnya dipakai pada saat panen tiba, seperti alat perontok padi (*thresher*) dan sabit bergerigi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Keputusan tersebut dengan alasan bahwa penggunaan mekanisme pada saat panen terlalu rumit dan banyak memakan waktu. Penanganan kedua mengenai penjemuran padi yang dilakukan seadanya dengan alas padi yang kotor. Sehingga saat penggilingan dilakukan banyak tertinggal kotoran yang menempel diberas. Hal tersebut menimbulkan banyak protes dari konsumen seperti pegawai negeri dan ABRI. Mereka membatalkan pembelian hanya karena kualitas beras yang kurang memuaskan.

Akibatnya terjadi penumpukan beras di Gudang Bulog dan penurunan harga dasar beras. Tentu masalah tersebut sangat merugikan petani karena dengan kondisi seperti itu KUD membeli padi petani dengan harga yang cenderung murah.

c) Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu lembaga desa dalam hal pertanian. Tugas KUD adalah membeli beras petani dan menentukan harga kepada petani berdasarkan harga dari pemerintah. Terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan KUD di Jawa Timur pada pelaksanaan Pelita IV. Ekonomi petani sangat ditentukan oleh peran KUD dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan mengenai harga yang ditentukan pemerintah untuk KUD adalah setiap KUD harus membeli padi dari petani bagaimanapun kondisinya serta membeli padi petani dengan harga lebih tinggi yaitu 10,00 rupiah. Kebijakan tersebut dalam realisasinya menimbulkan beberapa masalah diantaranya ada beberapa KUD yang tidak

menaikkan 10 rupiah dari harga dasar yang telah ditentukan pemerintah, Terdapat beberapa KUD yang lepas tangan, Dalam hal jadwal KUD masih kalah dengan para tengkulak, karena KUD mulai beraktifitas sesuai jam kantor. Sedangkan tengkulak bias saja lebih pagi. Akibatnya Petani lebih senang menjual hasil panennya ke pasar daripada ke KUD karena harga pasaran cenderung lebih mahal daripada harga di KUD yg ditentukan oleh pemerintah.¹² Kemudian kendala yang harus dihadapi oleh KUD sendiri adalah penolakan padi yang disetorkan kepada Dolog karena kualitasnya yang dianggap kurang.

d) Prioritas Swasembada Jagung dan Kedelai

Sehubungan dengan swasembada beras yang pernah terlampaui pada tahun 1984. Pada perkembangannya, areal padi mengalami penyusutan. Disebabkan karena lahan padi yang beresiko dialihkan untuk ditanami palawija kedelai dan jagung. Total luas tanaman yang sudah diintensifikasikan baru sekitar 90%, dari jumlah itu 60% menggunakan pola intensifikasi khusus (insus) dan sisanya masih berupa intensifikasi masal (inmas).¹³

e) Serangan Hama

Salah satu faktor penghambat proses panen padi adalah hama yang menyerang baik hama wereng, tikus, maupun tungro. Akan tetapi masalah hama yang paling besar dihadapi oleh petani Jawa Timur pada pelaksanaan Pelita IV adalah hama jamur yang mengganggu padi di Gudang penyimpanan. Walaupun hama seperti wereng dan tikus juga pernah menjadi masalah berat bagi petani, tetapi hama tersebut tidak begitu mempengaruhi jumlah produksi beras. Padi yang terserang jamur di Gudang penyimpanan sangat merugikan petani. Pasalnya di tahun 1985 padi yang disimpan di Gudang sebagian besar adalah padi yang belum cukup kering, sehingga kondisinya masih lembab dan rawan terhadap pembusukan dan jamur.

f) Harga Beras Yang Fluktuatif

Faktor penghambat pertumbuhan produksi beras pada 3 tahun terakhir setelah terjadi swasembada beras adalah harga dasar beras yang tidak menentu. Penetapan harga dasar disebabkan salah satunya adalah kualitas beras yang banyak memperoleh protes dari konsumen. Konsumen disini contohnya adalah pegawai negeri dan ABRI. Kualitas beras yang buruk seperti butir padi pecah, warna kekuningan-kuningan, dan berkapur menjadi alasan

dari protes tersebut. Sehingga KUD dalam tugasnya lebih teliti dalam pembelian beras. Alhasil, beras dari petani dengan kualitas buruk tidak laku dan petani banyak merugi.

Menangani masalah tersebut pemerintah meminta untuk tetap membeli kondisi padi walaupun sedikit rusak serta menaikkan harga dasar padi demi meningkatnya nilai tukar petani (NTP). Perkembangan harga beras periode Januari-mei 1986 belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani secara merata. Nilai tukar petani (NTP) selama 5 bulan pertama turun 0,32% dari 125,6 menjadi 125,2.¹⁴ Faktor utamanya adalah meningkatnya harga beras sampai Februari dan mulai turun pada bulan Maret, yaitu awal musim panen. Sementara tahun 1985 harga beras turun mulai Januari. Akibatnya padi mengalami deflasi 3,25%, keadaan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1985, mencapai -7,77%. Selain itu musim penghujan berkepanjangan yang menyulitkan petani untuk menyediakan secara kontinu sesuai permintaan pasar.

Kebijakan harga dasar yang fluktuatif dirasakan oleh petani pada saat panen raya tiba. Saat panen raya tiba dan persediaan padi melimpah maka harga dasar cenderung turun. Disebabkan karena jumlah permintaan konsumen yang turun. Sehingga penumpukan terjadi dan tidak ada pemasukan pendapatan sama sekali untuk petani. Maka kredit KUD menumpuk dan menjadi beban tanggungan bagi petani itu sendiri.

2. Pertanian Padi Provinsi Jawa Timur Pada Masa Gubernur Soelarso

Intensifikasi pertanian ditujukan untuk memaksimalkan lahan yang pasif terhadap sistem pertanian yang ada selama krisis pangan yang dialami Indonesia, baik menggarap lahan lama maupun perluasan lahan baru. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan melalui program Bimas yang meliputi lima paket teknologi dikenal dengan Panca Usahatani. Terdiri dari pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan alat pertanian yang modern, penggunaan bibit unggul, perbenihan serta sistem pemupukan yang baik, sistem pengairan dengan menambah daerah penampung air untuk kepentingan irigasi persawahan baik sawah yang secara resmi, tidak resmi maupun sawah tadah hujan.

Penekanan pelaksanaan intensifikasi pertanian terjadi di seluruh Jawa khususnya Jawa Timur yang merupakan daerah lumbung padi nasional. Jawa timur

¹² Surabaya Post, 23 April 1986. *KUD-KUD di Nganjuk Sulit Memenuhi Pengadaan*

¹³ Kompas, Jum'at 4 Juli 1986. *Lampu Kuning Buat Swasembada Beras*

¹⁴ Surabaya Post, 25 Agustus 1986. *Perkembangan Harga Beras Belum Tingkatkan Nasib Petani*

mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi proses pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut berjalan hingga akhir pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) yang ditandai dengan Rencana Program Pembangunan Lima Tahun ke V. Intensifikasi pertanian merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam memperbaiki sistem tanam di Indonesia. Pengertian intensifikasi pertanian tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur pola tanam yaitu Inmas, Insus Paket D, dan Supra Insus.¹⁵ Insus biasa itu sendiri berarti proses intensifikasi pertanian yang di dalamnya berisi tentang pengimplementasian program pancausaha. Dalam insus biasa tanah pemilikan dapat tersebar akan tetapi antar petani tidak terjalin kerjasama. Sedangkan untuk Paket D menggunakan lebih dari pancausaha yaitu menggunakan 7 unsur paket teknologi. Dan Supra Insus yang menggunakan 10 unsur teknologi.¹⁶ Supra Insus mempunyai dua ciri yang menonjol yaitu lokasinya 15.000 sampai 25.000 hektar disertai rekayasa sosial, teknik, dan ekonomi.

Pelaksanaan Pelita V di Jawa Timur dalam meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi menggunakan Supra Insus dan Paket D. Penerapan 10 teknik dalam Supra Insus dijelaskan dalam beberapa pengelompokan berikut;

a. **Pengolahan Lahan Pertanian**

Dahulu kebanyakan dari masyarakat Jawa khususnya Jawa timur yang sebagian besar terdiri dari masyarakat tradisional dalam sistem bajak sawah menggunakan cara manual. Cara manual dengan menggunakan media cangkul, alat bajak sawah yang terbuat dari kayu. Cara manual tersebut dirasa kurang efektif dan efisien, dimana hal tersebut menimbulkan banyak kerugian yang dialami petani. Mulai dari memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan tenaga yang ekstra dari petani itu sendiri, serta tanah yang diolah belum tentu maksimal. Dari beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pertanian menimbulkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga pengolahan tanah yang benar dan baik merupakan salah satu prioritas di dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian guna memperoleh panen yang besar.

Pengolahan lahan pertanian di Jawa Timur pada awal tahun 1990 sempat mengalami

kesulitan. Yang mana disebabkan karena banyak terjadinya perluasan lahan baru untuk kepentingan industry, perumahan, perkantoran dan jalan. Untuk itu langkah awal yang dilakukan pemerintah guna menangani masalah tersebut adalah dengan dikeluarkan instruksi Gubernur Kepala Dati I Jawa Timur No. 38/1988 tentang Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah Untuk Usaha Bukan Pertanian. Selain itu ditetapkan pula kebijaksanaan tata ruang Jawa Timur yang mengarah pada perkembangan zona industry ke daerah utara, mulai dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik hingga Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk daerah dengan potensi pertanian lebih ditekankan kepada daerah yang mempunyai daratan lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, diantaranya adalah daerah Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Mojokerto.¹⁷ Langkah-langkah tersebut berakibat bahwa meski terjadi penyusutan lahan sekitar 2.000 ha, namun peran pertanian dalam kontribusi penyediaan pangan nasional masih tetap dominan rata-rata sekitar 36% per tahun. Dibuktikan dengan luas wilayah area intensifikasi sebesar 1.212 juta hektar di tahun 1992 atau 102,8%. Hasil tersebut terlampaui lebih tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1.180 juta hektar.

b. **Penggunaan Benih Bermutu**

Pemilihan benih unggul sudah ada sejak pelaksanaan program padi sentra tahun 1963. Untuk menghindari ledakan hama wereng seperti yang terjadi di tahun 1970, maka pemilihan benih bermutu sangat diutamakan. Beberapa varietas yang menjadi anjuran program Supra Insus dimulai dari varietas IR26 dan IR28. Kemudian dalam perkembangannya diproduksi IR30, IR32, dan IR36. Sedangkan pada perkembangannya, Indonesia mengalami serangan hama wereng yang berbeda di tahun sebelumnya yaitu terjadi di tahun 1986 yang menjadi hama wereng biotipe 3. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemilihan benih padi diupayakan benih yang berlabel biru seperti IR 64. Penurunan hasil panen Jawa Timur terlihat di tahun 1987. Sehingga dalam pelaksanaan di tahun selanjutnya Pelita V Gubernur Soelarso menghimbau masyarakat Jawa Timur untuk menggunakan benih berlabel biru, misalnya Cisedane IR 36. Untuk IR 64 dianjurkan ditanam pada musim kemarau, karena varietas ini tidak tahan dengan penyakit. Di beberapa daerah apabila

¹⁵ Surabaya Post, Rabu 09 januari 1991. *Jawa Timur Memperoleh Empat Piala Presiden*

¹⁶ Hasil Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pelita V Tahun 1993. Hlm 05

¹⁷ Surabaya post, kamis 21 november 1991. *Lahan Pertanian di Jawa timur Susut 2.000 Ha Tiap Tahun*

ditanam varietas IR 64 akan timbul penyakit bercak merah yang disebabkan oleh bakteri. Masalah tersebut hingga tahun 1989 belum ditemukan obatnya, sehingga penggunaannya harus hati-hati karena berdampak pada penurunan jumlah panen.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah, salah satunya mengenai pengadaan benih palsu. Pengadaan benih palsu tersebut tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Diantaranya adalah Nganjuk, pasuruan, jember, jombang, lamongan, dan Bojonegoro. Disebabkan karena kurangnya perhatian dari petani itu sendiri. Mereka beranggapan semua benih yang sudah berlabel adalah asli. Hal tersebut tentunya membawa dampak buruk bagi hasil panen. Akibatnya jumlah panen menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggapan mengenai aslinya benih yang dibeli petani juga karena faktor keberhasilan masa panen petani Jawa Timur di tahun 1989. Melihat masalah tersebut Gubernur Soelarso mengambil suatu kebijakan dengan menghimbau Bupati setempat. Himbauan tersebut berisi tentang larangan untuk tidak menggunakan bibit dengan harga murah. Petani diharapkan untuk memikirkan bahwa bibit dengan harga sesuai standart akan berpengaruh besar terhadap hasil panen.

Sehingga diperoleh hasil produksi yang mencapai sasaran dengan penerapan teknologi Supra Insus. Terjadi di wilayah, Banyuwangi, Jember, dan Pasuruan. Sebagian besar daerah yang memang dipetakan oleh pemerintah daerah untuk lebih ditekankan sistem pertaniannya. Pada tahun 1989-1990 di Kabupaten banyuwangi mencapai hasil 16.744 hektar (102%) dengan hasil produksi 8,7 ton dari luas yang ditargetkan 16.400 hektar. sedangkan pelaksanaan Paket D di tahun 1989-1990, terealisasi 20.180 hektar dengan hasil produksi 8,4 ton per hektar dari target 20.000. untuk wilayah Jember sendiri, sebenarnya dari awal memang tidak ada masalah dengan penggunaan varietas benih jenis IR 64 karena masalah tersebut masih di bawah 25%.¹⁸ Sehingga belum sampai meresahkan petani karena masih bisa diatasi.

c. Pemupukan Berimbang

Dalam mempertahankan sebutan sebagai salah satu daerah yang besar kontribusinya terhadap pangan nasional, penggunaan pupuk yang tepat dan efisien merupakan salah satu indikator dari sistem pertanian padi di Jawa Timur. Pada tahun 1989 Jawa

Timur menggunakan pupuk urea tipe breket dalam menjamin kesuburan tanaman padi. Alasan penggunaan pupuk urea tipe tersebut tidak lain karena dapat menghemat pengeluaran, yang mana pupuk ini hanya ditebar satu kali dalam semusim. Selain penggunaan pupuk dalam negeri, pemerintah juga menekankan penggunaan pupuk impor. Diantaranya pupuk impor macam TSP, KNO₃, dan KCI. Pada perkembangannya penggunaan pupuk import mengalami pengurangan subsidi dengan jalan pemerintah menaikkan harga pupuk impor. Harga TSP sebelumnya 280/kg jadi 350/kg, harga KNO₃ 335/kg jadi 450/kg, dan harga KCL dari 280/kg menjadi 350/kg. Kenaikan harga pupuk tersebut tidak lain juga karena dipengaruhi oleh harga pasaran dunia yang melonjak. Kenaikan harga pupuk diharapkan pemerintah agar petani sebijaksana mungkin dalam menggunakan pupuk yang cenderung berlebihan.

d. Irigasi

Padi adalah tanaman pangan yang membutuhkan air paling banyak dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, rata-rata padi membutuhkan sedikitnya 8,6 mm setiap harinya.¹⁹ Dalam sistem pengairan guna menunjang keberhasilan hasil produksi, dilakukan penarikan iuran bagi petani. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari dengan semakin luasnya pelaksanaan pembangunan dan menyebarnya kegiatan, maka biaya untuk pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi semakin meningkat. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan mengikutsertakan mereka yang menikmati manfaat langsung jaringan irigasi dengan iuran pelayanan irigasi. Akan tetapi di sini iuran yang diminta oleh pemerintah sama sekali tidak memberatkan petani, karena iuran yang diadakan disesuaikan dengan kemampuan petani masing-masing.

Jawa Timur mempunyai pola pengairan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi air yang ada di waduk. Dinas Pengairan sudah mencatat berapa hektar sawah yang mendapat pengairan irigasi, begitu pula jadwal pengalirannya. Pelaksanaan sistem irigasi di Jawa Timur dengan cara memasang pompa-pompa untuk menaikkan air sungai ke sawah-sawah saat musim kemarau tiba. Pemasangan pompa-pompa tersebut terjadi di lamongan yaitu sepanjang sungai Bengawan

¹⁸Surabaya post 5 juni 1990. 10% Pestisida Palsu Beredar di Jawa timur

¹⁹ Pusposutardjo, Suprodjo, *Pengembangan Irigasi, Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001. Hal 60

Solo. Ada beberapa wilayah di Jawa timur yang tidak terlalu membutuhkan air saat musim kemarau tiba. Diantaranya adalah wilayah Malang dan Jember yang merupakan wilayah lumbung padi di Jawa Timur. Karena telah kita ketahui bahwa Malang dan Jember adalah wilayah yang berada di dataran tinggi. Sehingga air berlimpah sepanjang tahun, tanpa harus takut kekurangan.

e. Pemberantasan Hama dan Penyakit

Masalah utama dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian adalah serangan hama. Banyak pertanian mengalami gagal panen karena serangan hama, terutama hama wereng coklat (*Nilaparvata Lugens*). Hambatan tersebut merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan penurunan produksi padi. Seperti yang terjadi di Lumajang, yang mana serangan hama tikus yang terjadi di beberapa kecamatan di Lumajang menjadikan petani padi sedikit resah. Pasalnya serangan hama tikus polanya menyebar. Langkah yang dilakukan petani guna melawan serangan hama tikus adalah dengan cara memanen padi yang belum waktunya panen untuk menghindari serangan tikus yang lebih besar lagi. Kemudian tindakan kuratif terhadap serangan tikus dilakukan oleh 50 orang yang dipimpin oleh Kades setempat seperti yang terjadi di Kecamatan Jogotrunan Lumajang. Yang mana mereka melakukan penggrebekan dan memasang umpan yang diberi racun dan menutup lubang tikus di pematang sawah.

Masalah serupa juga terjadi di Madiun, yang mana wilayah Madiun bagian selatan sebagian besar tanaman padi jenis IR 64 terserang hama Walang Sangit. Masyarakat lokal mengatasi hal tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat Lumajang. Yang mana, padi yang belum siap panen sudah terlebih dahulu di babat habis karena jika semakin menguning warna padi maka tingkat walang sangit juga akan semakin banyak. Itulah beberapa gambaran tentang hama yang menyerang padi di wilayah Jawa Timur. Terdiri dari tikus, hama wereng, dan walang sangit.

Berbagai dampak serangan hama wereng coklat sangat dirasakan petani Jawa Timur. Dinas pertanian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Diantaranya, memberi bantuan berupa pestisida guna menanggulangi serangan wereng. Berbagai jenis pestisida diantaranya adalah Furadan 36, Theodan 35 cc, Azodrin 15, sevin, dan dursban. Kemudian Dinas pertanian juga menginstruksikan kepala PPL, PHP, dan para mantan supaya mengadakan pengamatan secara jeli di

lapangan. Upaya kedua yaitu memberi Kelrat secara Cuma-Cuma kepada para petani sebanyak 250 kilogram. Termasuk *depaccin* sebanyak 2 ton. Kedua jenis ini untuk membasmi secara rutin hama tikus yang kian mengganas. Langkah terakhir sebagai alternative optimal melakukan penggrebekan, seperti yang dilakukan oleh penduduk Nguter kecamatan Pasirian Lumajang.

f. Penyuluhan melalui BIMAS

Kebijaksanaan pertanian sejak Pelita I adalah kebijaksanaan yang berorientasi pada tanaman pangan yang menitikberatkan pada tanaman padi, di lahan sawah dan umumnya di pulau Jawa. Perhatian yang sangat besar terhadap upaya penyediaan pangan dan peningkatan produksi bahan pangan karena kemampuan pemerintah menjamin stabilitas harga beras. Tidak mengherankan jika perhatian pemerintah banyak dituangkan kepada produksi beras. Peningkatan produksi tersebut tidak dapat terlepas dari program Bimas, Inmas, Insus, dan akhirnya Supra Insus. Program Intensifikasi Khusus dimulai pada tahun 1984 dan terutama program Supra Insus merupakan keberhasilan peningkatan produksi padi yang mampu mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1985.²⁰

Bimas memiliki 2 program utama dalam pelaksanaannya, yang pertama Bimas bertugas sebagai pembimbing petani untuk melakukan teknik pertanian yang lebih baik dan yang kedua Bimas juga menyalurkan kredit maupun subsidi dari pemerintah untuk dijadikan modal bagi petani. Upaya yang dilakukan Bimas dalam proses penyuluhan bagi masyarakat Jawa Timur selama Pelita V direalisasikan oleh beberapa upaya.

g. Mekanisme Pertanian

Salah satu bagian yang terpenting dalam proses bercocok tanam adalah media yang digunakan petani dalam menggarap lahan garapannya. Mekanisme pertanian merupakan bagian terpenting yang ditekankan pemerintah selama orde baru. Karena alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang besar untuk meningkatkan produktivitas terhadap usaha tani. Jawa Timur daerah lumbung padi Jawa, untuk mempertahankan produksi padi mempunyai langkah tersendiri dalam hal mekanisme pertanian. Sampai dengan akhir Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) dampak yang

²⁰Mackie, Jamie dan Sjahrir. *perkembangan Terakhir Ekonomi Indonesia*. dalam Majalah Prisma. Senin 02 Agustus 1990 . hlm 48

diperoleh melalui peralatan pertanian yang lebih modern selalu ditekankan terhadap petani Jawa Timur. Seperti pada tahun 1989, Gubernur Soelarso sering mengadakan tindakan dengan menggalakkan mekanisme pertanian.

Mekanisme pertanian tersebut meliputi alat pengelola lahan pertanian dan peralatan tanam padi yang dipusatkan di Sidoarjo. Alasan pentingnya pengenalan mekanisme pertanian yang lebih canggih dan modern tidak lain karena penggunaannya sangat menguntungkan petani yang hemat terhadap tenaga kerja dan akan merangsang petani muda untuk kembali terjun ke lahan sawah. Mekanis tanam padi bisa dikendalikan oleh 5 orang dalam waktu per satu jam dan memperoleh 1 hektar luasnya. Hal ini jelas jauh berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan mekanisme tradisional yang membutuhkan hampir 30 orang dalam satu kali pelaksanaannya. Tahun 1990 peralatan pertanian jenis traktor baru ada 3.000 unit. Pengolahan tanah yang sempurna, serta penggunaan mekanisme pertanian yang modern menyebabkan kenaikan terhadap luas panen per hektar setiap tahunnya. Teknologi perontok padi yang pada perkembangannya semakin diterima oleh masyarakat. Dengan biaya yang amat ringan, mudah di buat, dan berguna untuk berulang kali ini masuk dalam perhitungan yang memberi nilai ekonomis dalam pemakaiannya. Contohnya adalah masyarakat di Lamongan yang memilih menggunakan cara ini daripada sistem “geblok an” atau “iles kaki” yang membudaya selama ini. Selain itu penggunaan alat sabit gerigi dan treser yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

h. Perbaikan Pasca Panen

Melalui teknik Supra Insus sektor pertanian mulai dikembangkan ke arah kegiatan pra dan pasca panen. Dalam surat keputusan bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Direktur Jenderal pertanian tanaman pangan dan kepala Bulog tahun 1987 pasal 4 bahwa kegiatan pra dan pasca panen mendapat bimbingan dari Dinas pertanian tanaman pangan sedangkan pelaksanaan pasca panen KUD dengan bimbingan dari kantor koperasi setempat.²¹ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas panen padi. Karena sejauh ini banyak masalah yang dihadapi petani justru setelah panen.

Pada saat panen padi petani seharusnya lebih berhati-hati serta menggunakan peralatan yang memenuhi syarat. Hal tersebut guna memaksimalkan

hasil panen yang di dapat. Karena banyak terjadi pengurangan panen setelah padi selesai di babat. Pengurangan hasil panen tersebut diindikasikan karena padi rontok dan tercecer. Jumlah tersebut menurut Gubernur Soelarso dalam *Surabaya Post* masih bisa ditekan dengan penggunaan alat sabit bergerigi dan treser yang sejauh ini belum dipergunakan petani secara merata. Cara kedua yaitu dengan menggunakan *kelambu plastic* pada saat merontokkan padi di Sawah. Panen yang tepat waktu, serta memakai pedal treser sebagai penghemat padi yang dirontokkan. Upaya tersebut membuahkan hasil, yang mana produksi padi per hektar di Jawa Timur meningkat dari 48,49 quinta per hektar di tahun 1986 menjadi 51,83 quinta per hektar di tahun 1990. Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 6,9% selama lima tahun atau naik 1,2% per tahun.²²

i. Lembaga Pertanian

Sarana penunjang peningkatan produksi pertanian yang terkait adalah kredit pertanian. Perkreditan adalah fasilitas yang diperlukan petani untuk mendapatkan akses sarana produksi (saprodi). Sesuai dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada petani, pola pemberian kredit disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Pemberian kredit disempurnakan melalui Kredit Usaha Tani yang penyalurannya dilaksanakan melalui Kelompok Tani. Sarana perkreditan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi berfungsi untuk menyalurkan saprodi kepada kelompok petani kecil secara langsung. Sekaligus menetapkan harga dasar bagi petani-petani kecil dengan cara membeli hasil pertanian.

Peran KUD di Jawa Timur pada pelaksanaan Pelita V sangat ditekankan kepada partisipasi masyarakat petani kecil pedesaan. Karena dirasa program KUD di Jawa Timur sejauh ini sudah berjalan dengan baik tetapi kurang maksimal. Yang mana, hanya petani yang mempunyai lahan lebih dari satu hektar yang mampu menikmati pelayanan KUD. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi yang diharapkan menjadi wadah bagi sebagian besar petani ternyata baru sebagian kecil petani yang berlahan luas. Faktor penyebab petani kecil enggan ikut serta adalah manfaat yang diperoleh KUD belum memadai.

Untuk itu dalam pelaksanaan Pelita V Gubernur Soelarso menekankan pentingnya

²¹*Ibid*, 49

²²Surabaya post, Kamis 12 Desember 1991. *Jawa Timur Kirim 150 Ton Beras ke Jawa barat per Hari*

pembangunan pedesaan dan koperasi. Berkaitan dengan KUD mandiri, Jawa Timur selama Pelita V baik prioritas I dan II sebanyak 595 buah. Selama tahun 1989-1990 ditargetkan 119 KUD mandiri dan hingga bulan februari tahun 1989 harus sudah terealisasi sebanyak 88 buah atau 75%. Gubernur Soelarso menghimbau tentang keberadaan KUD bagi berkembangnya usaha desa menunjukkan bahwa peran KUD bagi petani desa sangatlah penting. Dari himbauan tersebut dijelaskan bahwa perbankan harus lebih banyak menyalurkan KUK (Kredit Usaha Kecil) lewat KUD. Dengan suntikan dana dari KUK diharapkan lembaga desa itu lebih aktif lagi. Dalam artian bahwa KUD lebih banyak lagi memainkan peranannya di kancah perekonomian desa. Sehingga lembaga tersebut mampu dijadikan tumpuhan bagi masyarakat desa. Gubernur meminta Bupati maupun Walikota agar menguasai dengan benar seluk beluk koperasi mandiri termasuk 13 kriterianya. Dalam pelaksanaan selanjutnya, mulai tanggal 1 januari 1990 berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1989 harga dasar pembelian padi dari petani oleh KUD dinaikkan dari harga sebelumnya Rp. 250 menjadi Rp. 270 per kg. Sedangkan terhitung sejak 4 oktober harga pupuk juga dinaikkan. Jenis pupuk urea dan ZA dari harga semula 165 menjadi 185. Pupuk TSP dari 170 menjadi 210, dan pupuk KCL dari 165 menjadi 210. Walaupun naiknya harga padi yang juga dibarengi dengan naiknya pupuk, produksi per hektar tetap mengalami kenaikan sebesar 1,3% setahun. Pendapatan petani secara nominal naik rata-rata 9,1%, kenaikan produksi beras akibat intensifikasi besarnya 1,3% ditambah lagi dengan naiknya produksi akibat perluasan areal sebesar satu persen, sehingga bisa dicapai kenaikan 2,3% setahun. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang besarnya 1.9%.

Peran serta KUD dalam pengadaan pangan stok nasional, di Jawa Timur 1989 yang lalu mencapai 79% dari total pengadaan dolog Jawa Timur sebesar 937.183,60 ton setara beras. Sedangkan dari Non. KUD sebesar 44.263 ton setara beras, dan dari satgas 152.771 ton setara beras. Sehingga pada tahun 1990-1991 Jawa Timur mempunyai jumlah KUD terbanyak dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia.

3. Hasil Produksi Padi Pada Pelaksanaan Pelita V di Jawa Timur

Langkah operasional dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian di Jawa Timur pada pelaksanaan Pelita V di bawah kepemimpinan Gubernur Soelarso

telah dijelaskan di atas. Dengan menggunakan pola tanam Supra Insus 10 unsur teknologinya. Maka diperoleh hasil produksi tanaman padi, dalam perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Padi Jawa Timur Tahun 1988-1993

No	Tahun	Luas Panen Bersih (ha)	Rata-rata Produksi (Kw/ ha)	Produksi (Ton)
1	1988	1.455.494	50,76	7.706.284
2	1989	1.455.413	51,46	8.233.150
3	1990	1.520.975	52,63	8.234.844
4	1991	1.502.708	53,31	8.340.844
5	1992	1.480.801	53,93	8.885.420
6	1993	1.480.755	53,96	8.966.547

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan luas panen, produksi padi, dan rata-ratanya. Di tahun 1989 luas panen bersih seluas 1.455.413 ha dengan jumlah produksi yang di dapat sebesar 8.233.150 ton. Rata-rata produksi naik dari tahun ke tahun mulai dari 50,76 kw/ha di tahun 1988 menjadi 53,96 kw/ha di tahun 1993. Rata-rata produksi paling besar yaitu terjadi pada tahun 1990 yang mana rata-rata produksi naik 1,17 kw/ha dari tahun 1989. Sehingga tahun 1990 merupakan tahun gemilang bagi Jawa Timur karena di tahun tersebut Jawa Timur mendapatkan prestasi berupa intensifikasi pertanian.

Jumlah kenaikan yang terjadi dari tahun ke tahun tidak serta merta menunjukkan indikator keberhasilan. Karena di samping naiknya produksi padi di Jawa timur belum bisa dikatakan merata melihat beberapa masalah yang menyertai sistem pertanian di Jawa Timur. Salah satunya adalah kekeringan di musim kemarau yang terjadi cukup panjang. Akan tetapi dengan pola Supra Insus 10 masalah yang muncul dapat diatasi. Hasil tersebut menunjukkan usaha pertanian dengan pola Supra Insus dan Insus Paket D selama Pelita V yang diterapkan di Jawa Timur mendapat respon baik dari masyarakat.

Sebagai suatu provinsi yang mempunyai julukan sebagai daerah lumbung padi. Jawa Timur ingin mempertahankan prestasi yang selama ini diperoleh. Hasil pertumbuhan rata-rata selama pelita V menunjukkan bahwa Jawa Timur secara konsisten mampu

memproduksi padi tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat Jawa timur sendiri, tetapi sebagai suatu nilai jual ekonomis yang mampu menumbuhkan ketahanan pangan.

Berkaitan dengan pola supra insus yang dilakukan pada program intensifikasi pertanian. Jika tidak diterapkan di Jawa Timur setelah terjadinya penurunan produksi di tahun 1987 maka akan terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi akibat dari sistem jual hasil panen yang tidak teratasi. Karena beberapa masalah selama ini muncul akibat dari adanya Kredit Unit Desa (KUD), hanya petani yang mempunyai lahan luas yang mampu menikmati layanan KUD. Masalah tersebut sudah terjadi sejak diberlakukannya intensifikasi tanaman padi di Jawa Timur. Missal saja intensifikasi pertanian tanaman padi tidak diterapkan di Jawa Timur, maka keadaannya akan semakin memburuk. Kemudian jumlah kehilangan padi akan semakin meningkat, karena petani tidak dibekali dengan cara penanganan pasca panen agar tidak menimbulkan kerugian. Setelah itu, hasil produksi yang diperoleh semakin tahun akan semakin menurun karena mekanisme pertanian yang digunakan akan tetap bersifat tradisional. Walaupun beberapa petani sudah ada yang menggunakan mekanisme modern, berjalannya waktu akibat krisis yang terjadi maka akan terjual untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Kendala Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Pelita V di Jawa Timur

1. Bencana Kekeringan di Berbagai Wilayah

Pelaksanaan Program Intensifikasi pertanian di Jawa Timur pada Pelita V yang menekankan pada pola Supra Insus dengan 10 unsur teknologinya membawa dampak yang baik. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa pelaksanaan selama lima tahun berjalan lancar sesuai sasaran program pembangunan. Terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah banyaknya lahan pertanian yang dipusokan akibat kekeringan. Wilayah yang terserang masalah kekeringan diantaranya adalah Sidoarjo, Tulungagung, dan Mojokerto. Tanah yang kekeringan tersebut kondisinya pecah-pecah dan saluran air yang biasanya selalu memasok air kondisinya mengering. Batang, daun, maupun buah padi yang sudah berumur 60 hari meranggas berwarna coklat dan sebagian sudah lunglai.

Musim kemarau yang cukup panjang di tahun 1992 mengakibatkan petani mengalami penurunan produksi. Karena selama musim kemarau tahun 1991, 30.000 ha tanaman padi di Jawa Timur mengalami kekeringan. Sekitar

9.000 ha diantaranya dipusokan. 600 ha sawah puso dilakukan di Sidoarjo yang mengakibatkan petani merugi mencapai Rp. 300 juta. Kemudian Tulungagung luas lahan yang terancam puso sebesar 138 ha dan Mojokerto seluas 44,5 ha dipusokan. Sehingga salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah tumpangsari antara tanaman jagung dan padi gogo di lahan kering.

2. Pengadaan Benih dan Pestisida Palsu

Masalah yang juga menghambat proses penanaman padi di Jawa Timur pada awal tahun 1989 adalah maraknya persebaran pestisida palsu. Sekitar 10% pestisida palsu beredar di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur yang paling merasakan ancaman tersebut adalah Nganjuk, Banyuwangi, Blitar, Jombang, Tulungagung, dan Kediri. Pestisida palsu yang beredar luas di pasaran tersebut adalah pestisida jenis IR 64. Masalahnya petani sulit membedakan benih yang berlabel asli dengan yang palsu, karena dari segi fisik luarnya terlihat sama.

Melihat masalah Balai Proteksi Tanaman Pangan Wilayah VI segera mengambil tindakan. Hasilnya dalam suatu penelitian diperoleh hasil bahwa memang pada dasarnya sulit membedakan pestisida asli dengan yang palsu. Pembuktian antara pestisida asli dengan palsu harus dilakukan dengan cara melarutkan pestisida tersebut kedalam air. Jika asli maka dia tidak akan larut ke dalam air. Begitulah sedikit penanganan paling sederhana yang disosialisasikan pemerintah kepada seluruh petani Jawa timur agar tidak terjadi penurunan produksi padi akibat gagal panen.

3. Serangan Hama wereng

Serangan hama wereng coklat merupakan hama yang paling meresahkan petani. Pasalnya hama ini menyerang tanaman padi yang baru berbuah. Setelah itu, padi berubah warna lebih menguning kecoklatan dan layu. Sehingga masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar masyarakat pedesaan dengan konsep tradisional, langsung membat habis padi yang belum siap panen. Akibat petani hanya memanen 50% dari rata-rata panen biasanya. Hama wereng adalah penghambat utama yang sering dibicarakan petani Jawa Timur.

4. Pemerintah sudah mengupayakan penggunaan mekanis pertanian yang lebih modern dan

efisien. Akan tetapi pengenalan teknologi tersebut sedikit mengalami hambatan dalam penyebarannya. Karena masyarakat tradisional yang sebelumnya memang sudah nyaman menggunakan alat cangkul dibanding dengan traktor yang menurut mereka lebih memakan biaya yaitu pemakaian bahan bakar.

5. Dampak Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah daerah guna menstabilkan ekonomi Jawa Timur yang pada akhir pelaksanaan Pelita IV mengalami penurunan. Upaya tersebut direalisasikan pada pelaksanaan Pelita V dengan berbagai sasaran program, Intensifikasi pertanian tanaman padi dalam perkembangannya mengalami perubahan pola. Mulai dari intensifikasi umum menjadi intensifikasi khusus. Kemudian intensifikasi khusus menjadi unsur paket D dan Supra Insus. Teknologi Supra Insus yaitu suatu pola yang mempunyai 10 unsur teknologi yang belum ada di program Panca Usaha Tani. Pertumbuhan ekonomi secara riil Jawa Timur terhadap komoditas padi mencapai 7,72% per tahun.²³ Upaya tersebut menghasilkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Tiap SWP di Jawa Timur Selama Pelita V

No	Satuan Wilayah Pembangunan	PDRB (% per tahun)	
		Rencana	Realisasi
1	Gerbangkertosusila	6,30	9,99
2	Madura dan kepulauan	4,02	8,17
3	Banyuwangi	3,56	5,86
4	Jember & sekitarnya	4,22	7,68
5	Probolinggo-Lumajang	4,20	8,76
6	Malang-Pasuruan	6,20	8,40
7	Kediri & Sekitarnya	4,50	6,27
8	Madiun & Sekitarnya	5,80	5,57
9	Bojonegoro-Tuban	5,20	4,28

²³BAPPENAS, Rencana Pembangunan daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Tahun 1988/1989-1989/1990. Hlm 2-5

Sumber: BAPPENAS, Rencana Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993/1994

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh hasil pencapaian target pertumbuhan ekonomi tiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang cenderung meningkat. Beberapa wilayah kabupaten mencapai target yang telah ditentukan, hanya saja untuk wilayah Bojonegoro-Tuban belum mencapai target dari rencana yang diharapkan sebesar 5,20% per tahun realisasi yang didapat hanya 4,28%. Akan tetapi kurangnya pencapaian target untuk wilayah Bojonegoro-Tuban tidak mempengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pelaksanaan pertanian padi dengan pola Supra Insus melalui program Bimas berbagai upaya penyuluhan dilakukan guna mendapatkan petani yang terampil bercocok tanam dan mengolah hasil panen mereka. Berbagai upaya penyuluhan dilakukan seperti melalui media massa, kemudian temu wicara dimasing-masing kelompok tani.

Kemudian teknologi Supra Insus yang diterapkan di Jawa Timur juga membawa pengaruh bagi sistem peralatan pertanian. Teknologi modern lebih di perbanyak jumlah produksi dan penyebarannya. Teknologi tersebut seperti alat penggiling padi jenis *gratek* yang kemudian dilengkapi dengan mesin *rool huster*. Mesin ini merupakan mesin pemecah kulit dan mesin pemutih. Penggilingan padi menggunakan *grantek* tiap 1 quintanya menghasilkan sekitar 70 kg beras. Sedangkan RMU menghasilkan sekitar 65 kg beras. Mekanisme modern membawa dampak yang sangat baik bagi petani maupun calon petani. Dalam artian anak muda yang dulunya bekerja di perkotaan seperti di pabrik-pabrik industry. Setelah adanya mekanisme pertanian tersebut merangsang anak-anak muda untuk terjun langsung karena melihat keefektifan dan keefisien peralatan tersebut. Sehingga diperoleh hasil tentang penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini;

Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja

Tahun	Jumlah KK PETANI
1988	3.933.763
PELITA V	

1989	4.065.608
1990	4.043.861
1991	3.984.981
1992	4.248.939
1993	4.310.156

Sumber: Hasil Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pelita V Tahun 1993

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah Kartu Keluarga Petani dari tahun ke tahun selama Pelita V meningkat. Seperti yang terlihat pada tahun 1991 yang mengalami penurunan sebesar 58.880 kartu keluarga dari tahun 1990. Akan tetapi jumlah tersebut tidak bertahan lama, yang mana di tahun 1992 meningkat sebesar 263.958 kartu keluarga. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan dari tahun 1990 ke tahun 1991. Selanjutnya, di tahun meningkat lagi sebesar 61.217 kartu keluarga. Sehingga jelas bahwa antusias penduduk Jawa timur terhadap sistem pertanian yang berjalan pada Pelita V jika dilihat pada peningkatan jumlah kartu keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi orde baru. Kondisi tersebut bertahan hingga akhir Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang I (RJP I) yang terjadi selama 25 tahun pertama. Keadaan tersebut tidak serta merta berjalan sesuai dengan hasil yang di dapat. Seperti yang terjadi pada sistem ekonomi pertanian khususnya komoditas padi. Yang mana, padi mengalami fluktuasi setelah Indonesia menggunakan pola intensifikasi pertanian. Implementasi intensifikasi pertanian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa diterima petani. Terlihat pada awal pelaksanaan Pelita I dan II yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kemudian berjalan hingga Pelita IV upaya-upaya tersebut membuahkan hasil, yang mana Indonesia mampu berswasembada beras di tahun 1984. Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena di tahun selanjutnya ekonomi Jawa Timur menurun yang ditandai dengan menurunnya pendapatan per kapita dari 62,04% tanaman pangan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 1984 menjadi 60,67% di tahun 1988.

Berbagai masalah muncul seperti serangan hama, kekeringan, dan kurangnya penyuluhan terhadap petani yang menimbulkan penanganan pasca panen yang belum diterapkan secara benar serta penggunaan mekanisme yang kurang tepat. Masalah utama yang terjadi pada tiga tahun terakhir setelah adanya swasembada beras adalah masalah pada pascapanen. Untuk itu masalah tersebut diatasi dengan pola supra insus yang lebih mengutamakan mekanisme. Hal tersebut membawa dampak yang sangat positif bagi Jawa Timur. Gubernur Soelarso dan kebijakan pola Supra Insus mampu menghantarkan Jawa Timur pada prestasi dibidang intensifikasi pertanian

Berbagai program sangat ditekankan oleh Soelarso diantaranya perluasan jumlah Kredit Unit Desa (KUD) dan peran pemilik modal besar diharapkan ikut serta aktif dalam bertambahnya jumlah KUD. KUD dituntut untuk bertanggung jawab lebih atas naik turunnya harga dasar padi yang dapat merugikan petani. Kemudian penggunaan mekanisme pertanian diupayakan merata ke seluruh wilayah terutama mekanisme pascapanen. Agar hasil panen yang di dapat maksimal sesuai sasaran dari program kebijakan. Setelah itu, berkaitan dengan adanya musim kemarau di Jawa Timur yang cukup panjang Gubernur Soelarso menegaskan untuk dilakukan penggeseran tanaman jagung untuk musim tanam 1991 – 1992 dengan tanaman padi. Utamanya untuk daerah yang secara teknis memungkinkan hal tersebut. Cara lain yaitu melakukan tumpang sari jagung dengan padi gogo di lahan kering dan tumpang sari gogo rancak dengan jagung di lahan sawah tadah hujan.

Hasil yang di dapat dari berbagai program yang ditekankan oleh Soelarso adalah Jawa Timur mampu menyumbang 37,52% pengadaan stok pangan nasional dan untuk Jawa Timur sendiri mampu menaikkan jumlah luas panen serta jumlah produksi. Kemudian dampak untuk masyarakat Jawa Timur dari kepemimpinan Soelarso adalah masyarakat Jawa Timur tingkat kesejahteraan lebih baik serta aktif berpartisipasi dalam berbagai program seperti pembentukan kelompok tani. Sehingga diperoleh berbagai prestasi kelompok tani baik di tingkat provinsi maupun Nasional.

B. Saran

Penulis menyadari masih terdapat kelemahan dalam karya tulis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat menjadi

reverensi bagi penulis selanjutnya yang mengangkat tema sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1989/1990

Buku

Achmad, Affandi. 1982. *vademecum Bimas Volume III 1977*. Jakarta: c.v. Yasaguna.

Anne booth. 1990. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES

Atep, Afia. 1994. *Beberapa Catatan Mengenai Swasembada Pangan*. Jakarta : Universitas Mercu Buana

BPS, 1988. *Jawa Timur dalam Angka*

BPS, 1989. *Jawa Timur dalam Angka*

BPS, 1990. *Jawa Timur dalam Angka*

BPS, 1991. *Jawa Timur dalam Angka*

BPS, 1992. *Jawa Timur dalam Angka*

BPS, 1993. *Jawa Timur dalam Angka*

Bustanul arifin, 2004. *Anilisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas

Djamin, Zulkarnain. 1993. *"Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama"*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Fox, James J. Dkk. 1997. *Pembangunan yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia

Hikmah Rafika Mukti. 2000. *Kebijakan Pangan*. Universitas Indonesia.

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Mubyarto, 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES

Muhammad Firdaus, dkk. *Swasembada Beras dari Masa ke Masa: Telaah Efektifitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional*. IPB Press. Bogor.

Pusposutardjo, Suprodjo. 2001. *Pengembangan Irigasi, Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Susanto, R, 2002. *Pertanian Organik*. Jakarta : Yayasan kanisus.

Scott, C, James. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.

Soekartawati. 1994. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soestrisno, Loekman. 1999. *Pertanian Pada Abad Ke 21*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

1993. *Hasil Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pelita V Tahun*. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

1988. *Produk Regional Domestik Bruto Propinsi Jawa Timur Tahun 1988-1992*. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

1990. *Rancangan Program Tahunan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Tahun 1990/1991*. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Koran-koran

"10% pestisida Palsu Beredar di Jatim" *Surabaya Post*. Kamis, 9 November 1989.

"Gubernur Soelarso Minta Pengusaha Ikut Berkiprah" *Surabaya Post*. Rabu, 07 maret 1990.

"Gubernur Minta Tiap Bupati Galakkan Mekanisme Pertanian" *Surabaya Post*. Sabtu, 19 Januari 1991.

"Gubernur Awali Tanam Padi di Pasuruan" *Surabaya Post*. Selasa, 28 November 1989.

"Jatim akan Lampau Target Produksi Padi" *Kompas*. Selasa, 12 Mei 1992

"Jatim Kirim 150 Ton Beras ke Jabar/Hari" *Surabaya Post*, Jum'at, 23 Maret 1991

"Jawa Timur Memperoleh Empat Piala Presiden" *Surabaya Post*, Rabu, 9 Januari 1991

"Kemarau 1991, 9.000 Ha Padi di Jatim Puso" *Surabaya Post*. Jum'at, 27 desember 1991.

"Konversi Lahan Pertanian Ganggu Swasembada Beras" *Kompas*. Jum'at, 5 Juli 1991.

"Kesejahteraan Petani Jatim Membaik" *Surabaya Post*, 6 September 1988

"Kenaikan Harga Gabah akan Gairahkan Petani Berproduksi" *Kompas*, 6 Oktober 1989

"Lima Sampai Lima belas Persen Padi Hilang Akibat Pasca Panen" *Surabaya Post*. Kamis, 12 Desember 1991.

"Musim Kering di Jatim Tak Pengaruhi Pengadaan Pangan" *Surabaya Post*, sabtu, 3 Agustus 1991

"Petani Akan Dibebani Iuran Pelayanan Irigasi" *Kompas*. Kamis 29 Juni 1989.

"Pemalsuan Pestisida Tumbuhkan Apatisme Petani" *Surabaya Post*. Senin, 13 November 1989.

"Produksi Padi Jatim 1992 Diproyeksikan Naik" *Surabaya Post*. Sabtu, 25 Januari 1992